

# STATISTIK POLITIK

*PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT*

2022



# STATISTIK POLITIK

*PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT*

2022



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

# **Statistik Politik**

## **Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022**

**ISSN** : 2746-5128  
**No. Publikasi** : 52000.2342  
**Katalog BPS** : 4601003.52

**Naskah:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Desain Tata Letak:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Diterbitkan Oleh:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber Gambar :

[www.unsplash.com](http://www.unsplash.com)

Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022  
xii+ 46 halaman; 17,6 x 25 cm

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat*

# **TIM PENYUSUN**

**Pengarah :**

Drs. Wahyudin, M.M

**Koordinator Teknis :**

M. Ikhsany Rusyida, SST, M.Si

**Naskah :**

M. Faiq Syafiqi Awwali Manshur, S.Tr.Stat.

**Pengolah Data :**

M. Faiq Syafiqi Awwali Manshur, S.Tr.Stat.

**Gambar Kulit :**

M. Faiq Syafiqi Awwali Manshur, S.Tr.Stat.

**Penyunting :**

Gusti Ketut Indradewi, SST, M.Sc

Yudi Wahyudin, SST, M.Si

Rika Verlita, SST

Isna Zuriatina, SST, MT



# Kata Pengantar

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS Provinsi NTB) berupaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini juga tidak terlepas dari tugas BPS untuk penyediaan dan publisitas data beragam dan berkualitas merupakan hal yang tak terelakkan lagi dimasa mendatang, sehingga BPS berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan data terkait gambaran umum politik di NTB. Data-data yang disajikan bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022, serta bersumber dari beberapa instansi seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, Bakesbangpoldagri, dan Kepolisian Daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna data, publikasi Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyajikan data-data tahun 2022 seperti tingkat partisipasi politik, produk perundangan, demokrasi, dan sebagainya. Data-data pemilu legislatif tahun 2019 tetap ditampilkan dikarenakan belum adanya data pemilu legislatif dan pemilukada terbaru. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan data, publikasi statistik Politik akan terus mengalami penyempurnaan, baik struktur maupun muatan.

Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan agar penyusunan berikutnya lebih sempurna.

Mataram, September 2023  
**BADAN PUSAT STATISITIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Kepala,**



**WAHYUDIN**



# Abstraksi

Pesta demokrasi merupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat karena pilkada dan pemilu legislatif merupakan salah satu ajang yang ditunggu oleh masyarakat untuk memilih sendiri pemimpinnya. Situasi politik di NTB dapat digambarkan diantaranya dengan hasil pemilu legislatif dan pemilukada yang terakhir dilaksanakan. Untuk pemilu legislatif di tingkat provinsi, hasil perolehan suara terbanyak diraih Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Bintang Restorasi. Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 3.499.265 jiwa, 70,05 persen diantaranya menggunakan hak pilih dan 29,95 persen golput. Dari jumlah perolehan suara tersebut 95,53 persen suara dinyatakan sah dan 4,47 persen suara tidak sah.

Jumlah peraturan daerah (perda) yang dihasilkan DPRD Provinsi pada tahun 2022 sebanyak 9 perda, menurun jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, yaitu 21 perda. Dari 9 jumlah perda yang dihasilkan DPRD Provinsi NTB selama tahun 2022, 3 diantaranya merupakan inisiatif dari DPRD.

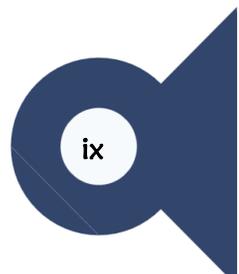
Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Jumlah ormas dan LSM yang terdaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sampai tahun 2022 sebanyak 471 organisasi.

Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan hak bagi semua warga negara. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, IDI NTB sebesar 73,38, meningkat jika dibandingkan dengan IDI NTB pada tahun 2021, yaitu sebesar 72,69. Dengan pencapaian nilai IDI tersebut, tingkat kinerja demokrasi di NTB berada pada kategori sedang. Dari data IDI 2022 diperoleh informasi bahwa Aspek Kesetaraan, Aspek Kebebasan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi termasuk dalam kategori sedang.

<https://ntb.bps.go.id>

# Daftar Isi

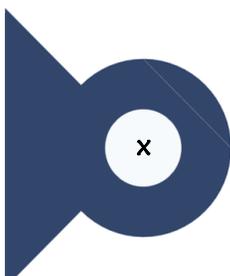
Kata Pengantar .....	v
Abstraksi .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel .....	xi
BAB I. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	4
1.4 Sistematika Penyajian .....	4
BAB II. Metodologi.....	5
2.1 Jenis dan Sumber Data .....	5
2.2 Konsep dan Definisi.....	5
BAB III. Gambaran Umum Provinsi NTB.....	9
BAB IV. Gambaran Umum Politik NTB .....	11
4.1 Pemilu Legislatif Terakhir.....	11
4.2 Peran DPRD.....	12
4.3 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden .....	15
4.4 Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM .....	18
4.5 Perkembangan Demokrasi di NTB.....	20
TABEL-TABEL .....	25



# Daftar Gambar

Gambar 4.1	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2022.....	13
Gambar 4.2	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2021-2022.....	14
Gambar 4.3	Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB.....	15
Gambar 4.4	Persentase Pemilih dalam Pemilu Terakhir menurut Hasil Perolehan Suara Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB.....	18
Gambar 4.5	Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2022.....	29
Gambar 4.6	Perkembangan Indeks Demokrasi NTB, 2009 – 2022	22

<https://ntb.bps.go.id>



# Daftar Tabel

Tabel 1.	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di NTB Tahun 2022.....	27
Tabel 2.	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.....	28
Tabel 3.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022.....	29
Tabel 4.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.....	30
Tabel 5.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.....	31
Tabel 6.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022.....	32
Tabel 7.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dompu Tahun 2022.....	33
Tabel 8.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bima Tahun 2022.....	34
Tabel 9.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.....	35
Tabel 10.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.....	36
Tabel 11.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Mataram Tahun 2022.....	37
Tabel 12.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2022.....	38

Tabel 13.	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019.....	39
Tabel 14.	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019.....	40
Tabel 15.	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019.....	41
Tabel 16.	Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019.....	42
Tabel 17.	Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019.....	43
Tabel 18.	Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di Nusa Tenggara Barat.....	44
Tabel 19.	Jumlah Peraturan Daerah dan Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD di NTB Tahun 2022.....	45
Tabel 20.	Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Mendaftar dan Total Terdaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi dan Kabupaten/Kota NTB Tahun 2022.....	46

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi politik yang stabil merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Stabilitas situasi politik akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Berbagai perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia menciptakan perbedaan yang signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Ketika reformasi 1998 bergulir dan mengakhiri masa orde baru, situasi politik nasional pun mengalami tuntutan serupa untuk berubah dan berbenah. Kekuasaan penyelenggaraan negara yang sebelumnya berjalan tersentral di pusat pada masa orde baru, perlahan mengalami perubahan untuk mengakomodir tuntutan reformasi. Tuntutan pendistribusian kekuasaan tersebut terjadi dalam 2 level, horizontal dan vertikal. Di level horizontal, lembaga-lembaga negara diluar eksekutif diperkuat agar dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Di level vertikal, adanya pemberlakuan otonomi daerah yang mendelegasikan berbagai kewenangan yang sebelumnya merupakan otoritas pusat sehingga bisa dikeola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Perubahan-perubahan situasi politik tersebut juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Berbagai kepentingan dalam masyarakat

diberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya, diantaranya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik di daerah. Secara umum, partai-partai politik yang bermunculan di daerah merupakan kepanjangan dari parpol di pusat.

Selain itu, perubahan budaya politik yang semakin terbuka juga menjadi aspek yang penting. Media cetak ataupun elektronik menjadi leluasa memberikan kritik terhadap pemerintah. Organisasi-organisasi masyarakat baru bermunculan sebagai wadah masyarakat menyampaikan kepentingannya. Kebebasan menyalurkan pendapat dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan.

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik.

Diantara isu penting yang muncul adalah tuntutan peningkatan keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Pada pemilu 2014 ketentuan kuota minimal 30 % perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) dengan sistem zipper (minimal terdapat satu orang perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Perkembangan bidang politik yang demikian cepat seringkali berimbas, baik langsung maupun tidak, terhadap kesejahteraan

rakyat. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi politik yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Publikasi Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik di NTB. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro mengenai situasi politik masyarakat NTB. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik hasil pemilukada terakhir di Kabupaten/kota dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan pembangunan politik dan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan demokrasi di NTB.

### 1.3 Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik Provinsi NTB 2022 menyajikan gambaran politik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi di wilayah NTB.

### 1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam tiga bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi. Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Bab III menjelaskan gambaran umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bab terakhir adalah menyajikan gambaran umum politik (Bab IV).

# BAB II

## Metodologi

### 2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data BPS dan data sekunder dinas/instansi dengan cara kompilasi hasil registrasi/catatan. Data BPS berasal dari hasil proyeksi penduduk, dan Indeks Demokrasi Indonesia sedangkan data dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Polres/Polresta/Polda, KPU, Bakesbangpoldagri, dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikumpulkan melalui Survei Politik dan Keamanan.

### 2.2 Konsep dan Definisi

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

#### **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

## **Partai Politik**

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

## **Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

## **Peserta Pemilu Legislatif**

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

## **Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004).

## **Golongan Putih**

Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

## **Warga Negara Indonesia**

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

### **Pemilih**

Pemilih adalah warga Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah kawin (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008)

### **Partisipasi Penduduk Dalam Pemilu**

Partisipasi Penduduk Dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi Politik adalah keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi 2, konvensional seperti memilih dalam pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta non konvensional seperti demonstrasi dan mogok.



# Provinsi NTB

Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak pada 115<sup>o</sup>46' – 119<sup>o</sup>5' Bujur Timur dan 8<sup>o</sup>10' – 9<sup>o</sup>5' Lintang Selatan. NTB merupakan salah satu provinsi dan berada di kawasan Timur Indonesia, yang terletak diantara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTB dikenal sebagai daerah Bumi Gora (Gogo-Rancah) artinya bumi yang dapat ditanami padi baik di daerah kering maupun di daerah basah.

Letak NTB yang berbatasan langsung dengan daerah tujuan wisata dunia yaitu Provinsi Bali, sedikit banyak memberi dampak terhadap kegiatan pariwisata di NTB. Banyak kawasan wisata alam di Provinsi NTB yang sangat bagus pemandangan alam dan pantainya. Seperti: Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Pantai Senggigi, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pantai Lakey dan obyek wisata lainnya.

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.164,84 km<sup>2</sup>, terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau-pulau kecil. Luas Pulau Sumbawa mencapai tiga kali luas Pulau Lombok. Sebanyak 280 pulau terdapat di Provinsi NTB dan baru 32 pulau yang berpenghuni. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan 117 kecamatan dan 1.151 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa mempunyai jumlah kecamatan yang paling banyak, yaitu 24 kecamatan dan kabupaten yang paling banyak mempunyai jumlah

desa/kelurahan, yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 254 desa/kelurahan.

Persebaran penduduk di NTB tampak tidak merata baik antar pulau maupun kabupaten/kota. Penduduk lebih banyak bertempat tinggal di Pulau Lombok dibandingkan Pulau Sumbawa. Penduduk terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1,37 juta jiwa dan yang terendah adalah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 150 ribu jiwa. Dengan luas wilayah yang lebih sempit, Pulau Lombok dihuni oleh 3,87 juta jiwa atau sekitar 70,72 persen dari jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat dan pulau Sumbawa yang lebih luas hanya dihuni oleh sekitar 1,6 juta jiwa atau 29,28 persen dari jumlah penduduk NTB.

# **BAB IV**

## **Gambaran Umum Politik NTB**

### **4.1 Pemilu Legislatif Terakhir**

Dinamika politik di Indonesia juga dirasakan di NTB. Hal ini tercermin dari banyaknya partai politik yang mendapat kursi di DPRD baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat NTB. Di tingkat provinsi, hasil perolehan suara pemilu legislatif 2019 sesuai urutan dari terbanyak adalah sebagai berikut: Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Bintang Restorasi.

Tabel 3 sampai tabel 12 menyajikan data tentang jumlah anggota DPRD menurut partai politik di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB tahun 2022. Dalam tabel-tabel tersebut tampak bahwa jumlah partai yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten/Kota berkisar antara 10 sampai dengan 13 partai. Kursi di DPRD terbanyak di Provinsi NTB dikuasai oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Dua kabupaten/kota dengan jumlah anggota DPRD terbanyak di NTB adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok

Tengah dengan masing-masing anggota sebanyak 50 dan 48 orang. Dari keterwakilan perempuan di legislatif, semua kabupaten/kota memiliki anggota perempuan. Anggota DPRD perempuan terbanyak tahun 2022 adalah di DPRD Kota Mataram.

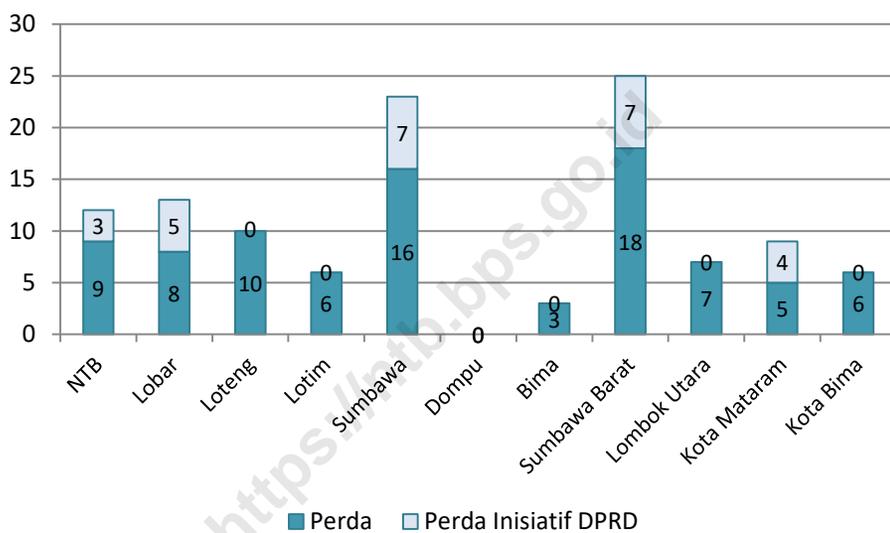
## 4.2 Peran DPRD

DPRD memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran daerah, dan fungsi pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Salah satu peran DPRD adalah menyusun peraturan daerah (perda) baik berdasarkan usulan pihak eksekutif maupun yang diinisiasikan oleh DPRD. Pada tahun 2022 DPRD Provinsi NTB menghasilkan perda sebanyak 9 buah. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya merupakan inisiasi dari DPRD (inisiatif DPRD).

Selama tahun 2022, peraturan daerah paling banyak dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 18 perda. Selanjutnya disusul oleh DPRD Kabupaten Sumbawa sebanyak 16 perda dan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10 perda. Sedangkan DPRD Kabupaten Dompu pada tahun 2022 tidak menghasilkan perda sama sekali. Jumlah perda yang banyak yang dihasilkan oleh suatu daerah tidak dapat menjadi ukuran telah dijalankannya fungsi legislasi DPRD dengan baik, akan tetapi perlu juga untuk melihat kualitas dari perda yang dihasilkan tersebut. Apabila dilihat dari jumlah perda yang merupakan inisiatif DPRD, DPRD di semua kabupaten/kota yang ada di NTB

dipandang belum memuaskan publik. Hal ini dikarenakan rendahnya inisiatif pembuatan perda yang disahkan. Bahkan 6 Kabupaten/Kota tidak memiliki perda hasil inisiatif DPRD pada tahun 2022.

**Gambar 4.1**  
**Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD**  
**Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2022**

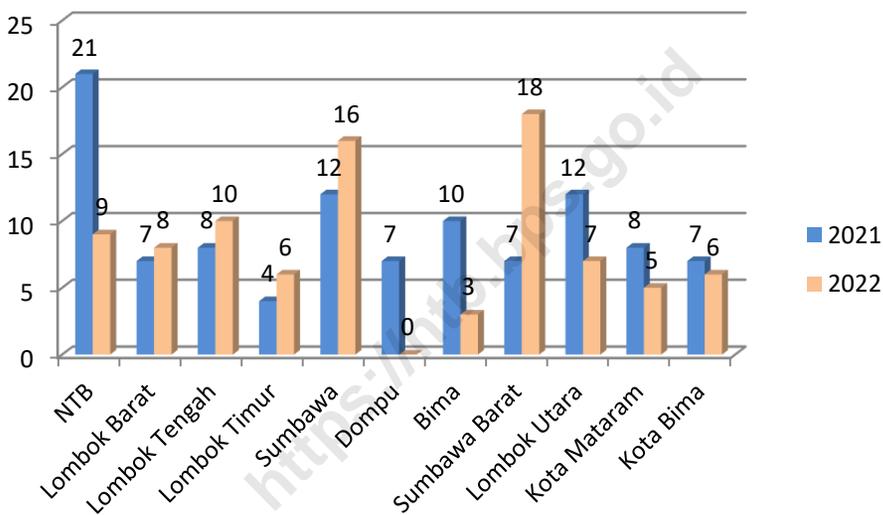


Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Sepanjang tahun 2021-2022, secara total jumlah perda yang dihasilkan dari DPRD yang ada di provinsi NTB cenderung menurun. Meskipun demikian, jika dilihat pada masing-masing Kabupaten/Kota, terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya, DPRD yang menghasilkan peningkatan jumlah perda terbanyak adalah DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa.

Yaitu masing-masing meningkat 11 dan 4 perda dari tahun 2021. Peningkatan jumlah perda yang dihasilkan diharapkan sejalan dengan peningkatan kualitas terhadap perda yang dihasilkan tersebut.

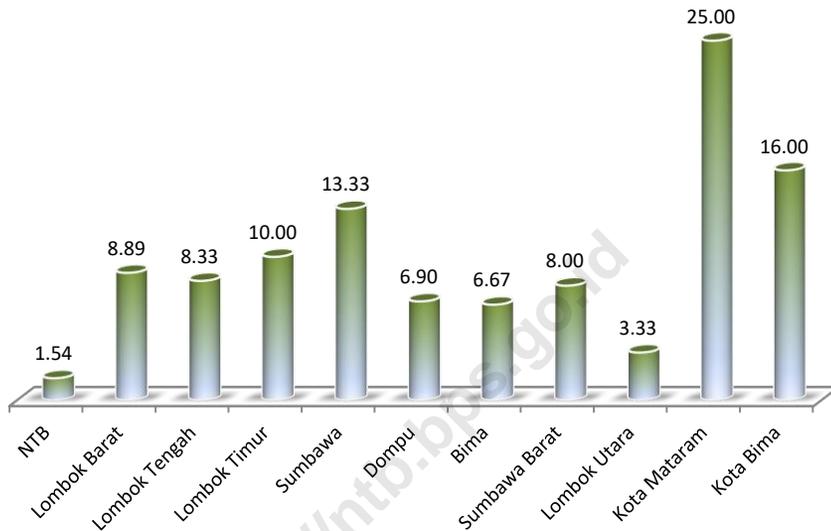
**Gambar 4.2**  
**Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD**  
**Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2021-2022**



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Selain dari jumlah peraturan yang dihasilkan, dari DPRD juga dapat dilihat peran perempuan dalam parlemen, yang dapat dilihat dari banyaknya anggota perempuan pada DPRD Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota. Keterlibatan perempuan di Parlemen di NTB tertinggi adalah di Kota Mataram dan Kota Bima. Kemudian yang terendah adalah di Kabupaten Lombok Utara dan Provinsi NTB. Hal ini menggambarkan bahwa peran aktif perempuan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah lebih tinggi di wilayah Kota dibandingkan Kabupaten.

**Gambar 4.3**  
**Keterlibatan Perempuan di Parlemen**  
**Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2022**



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

### 4.3 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2019 merupakan tahun pertama kali dilakukan pemilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden secara serentak. Upaya ini sejalan dengan semangat penyederhanaan pemilu yang digagas sejak beberapa tahun sebelumnya. Pilkada misalnya, telah didesain agar dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Sinkronisasi jadwal pelaksanaan pemilu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dari sisi waktu, tenaga, dan biaya.

Secara teknis, Pemilu 2019 juga dilaksanakan dengan beberapa perubahan. Diantaranya adalah penghitungan suara dengan metode *Sainte Lague*, menggantikan metode bilangan pembagi pemilih (BPP) atau *Kuota Hare*, yang telah digunakan pada beberapa pemilu sebelumnya. Untuk mengakomodasi bertambahnya beban petugas pada pemilu serentak, jumlah pemilih di TPS juga diturunkan dari maksimal 500 menjadi 300 pemilih saja. Dengan pengurangan tersebut, jumlah TPS bertambah dari 12.020 pada Pemilu 2014 menjadi 15.989 pada Pemilu 2019.

Selain itu, masa kampanye untuk caleg serta presiden dan wakil presiden juga dibuat lebih panjang, dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019, atau hampir selama tujuh bulan. Pada Pemilu 2014, kampanye untuk pemilihan legislatif mulai 1 Januari hingga 5 April 2014, atau sekitar tiga bulan saja. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pilpres 2014 lebih singkat lagi, hanya satu bulan dimulai pada 4 Juni 2014 dan berakhir pada 5 Juli 2014.

Berdasarkan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, kursi yang diperebutkan di DPR pada Pemilu 2019 bertambah, dari 560 pada 2014 menjadi 575 kursi. Jumlah partai politik yang berkompetisi juga bertambah. Dari 12 partai politik nasional dan tiga partai lokal Aceh pada Pemilu 2014 menjadi peserta kembali pada Pemilu 2019. Selain itu, terdapat tambahan empat partai nasional baru, yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada Pemilu 2019, terdapat 3.667.253 jiwa yang terdaftar dalam DPT. Dari seluruh calon pemilih yang terdaftar dalam DPT, 49,11 persen diantaranya laki-laki, sementara 50,89 persen lainnya perempuan. Semua calon tersebar ke dalam 15.989 TPS di 10 kabupaten/kota.

Pada Pemilu 2019, kualitas DPT juga masih terdapat persoalan. Untuk pilpres terdapat 111.347 pemilih yang berasal dari Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK adalah daftar pemilih yang tinggal di sebuah wilayah namun tidak tercatat dalam DPT. Pemilih dari daftar ini baru diperkenankan memilih pada rentang waktu 12.00-13.00 dan tergantung pada ketersediaan surat suara.

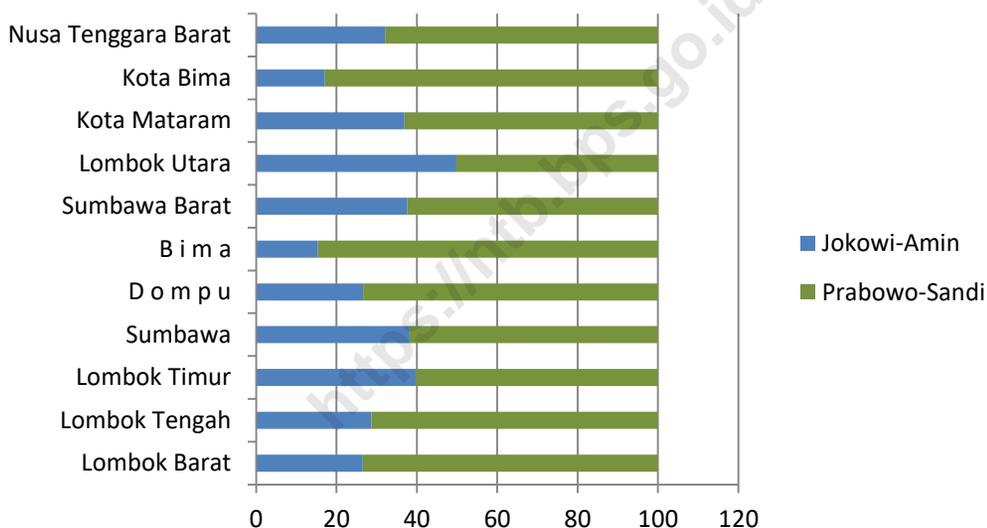
Pilpres 2019 diikuti oleh dua pasangan calon (paslon). Paslon nomor urut 01 adalah Joko Widodo – Ma'ruf Amin. Pasangan ini diusung oleh sepuluh partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai lain yang mendukung tetapi tidak memiliki kursi di parlemen yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai perindo, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sementara itu, paslon nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno. Paslon ini diusung oleh enam partai politik, yaitu: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Partai lain yang mendukung tetapi tidak memiliki kursi di parlemen, yaitu Partai Garuda dan Partai Berkarya.

Di NTB paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno dengan perolehan suara 2.011.319 suara atau sebesar 67,89 persen dari total suara. Sementara itu, paslon nomor urut 01, Joko Widodo – Ma'ruf Amin, memperoleh 951.242 suara atau sebesar 32,11 persen dari total suara.

Paslon nomor urut 02 memenangkan suara di semua kabupaten/kota di NTB. Partisipasi pemilih pada pilpres 2019 sebesar 82,75 persen. Partisipasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan 89,77 persen, sementara terendah di Kabupaten Bima dengan partisipasi sebesar 79,31 persen.

**Gambar 4.4**  
**Perolehan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2019**



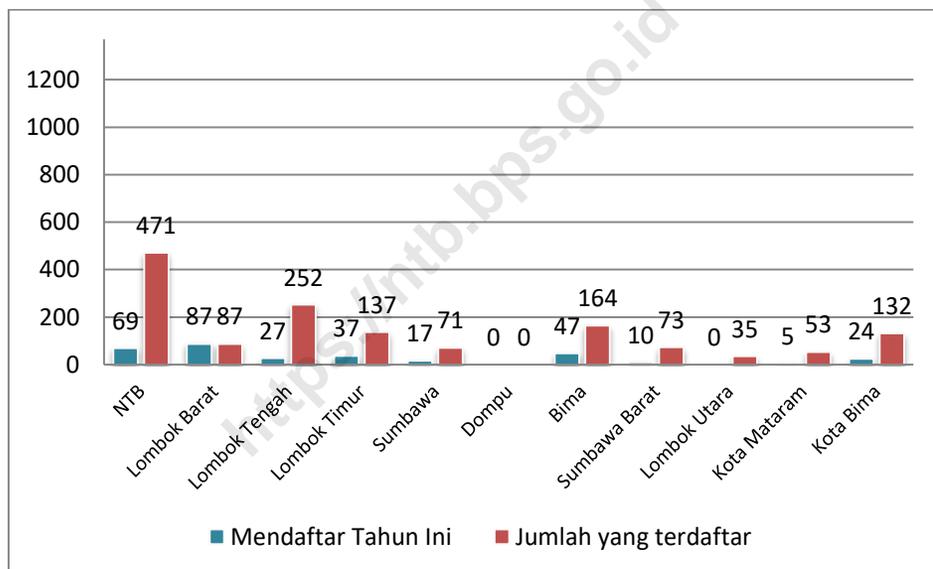
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### 4.4 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Ormas dan LSM ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan terutama pada ranah politik. Perkembangan jumlah ormas

dan LSM di NTB meningkat, saat ini ada setidaknya 1475 ormas atau LSM yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Pada tahun 2022 terdapat 69 ormas dan LSM yang mendaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi NTB. Sementara itu total yang mendaftar pada tahun 2022 sebanyak 323 ormas atau LSM di seluruh wilayah Provinsi NTB.

**Gambar 4.5**  
**Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2022**



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Berdasarkan Gambar 4.5, perkembangan jumlah ormas atau LSM yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak hanya pada tingkat provinsi saja melainkan juga pada tingkat kabupaten/kota. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan jumlah ormas atau LSM ini antara lain karena perkembangan di bidang politik, demokrasi, perkembangan ekonomi dan teknologi. Kabupaten Lombok Tengah merupakan

kabupaten yang memiliki ormas atau LSM terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu sebanyak 252, dimana 27 ormas atau LSM mendaftar pada tahun 2022 di Bakesbangpoldagri. Sementara itu, Ormas atau LSM yang paling sedikit adalah yang terdaftar di Kabupaten Lombok Utara yaitu sebanyak 35. Ormas atau LSM akan dapat mencapai tujuannya dengan baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

#### 4.5 Perkembangan Demokrasi di NTB

Menurut konsep demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka yang mewakili rakyat yang dipilih di bawah sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Namun secara praktek di lapangan demokrasi diterapkan secara berbeda-beda. Penerapan demokrasi beragam, sering kali diterapkan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah dan terdapat keterbandingan antar wilayah diperlukan instrumen yang universal.

*Freedom House* melakukan pengukuran demokrasi pada tahun 1972 menggunakan klasifikasi *free countries*, *partly free countries*, dan *non free countries*. Sejak tahun 2008, Negara Indonesia termasuk dalam *free countries*, sementara sebelumnya digolongkan dalam negara *partly free countries*. Untuk mengukur pembangunan demokrasi sampai level provinsi, sejak tahun 2007, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang

diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain.

Pada tahun 2022, BPS mulai mengembangkan penghitungan IDI menggunakan metode baru. Penghitungan IDI menggunakan metode baru mewakili tiga dimensi yaitu dimensi politik, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial. Ketiga dimensi itu dihitung dari 22 indikator yang memberikan kontribusi terhadap 3 aspek IDI. Tiga aspek IDI dengan

metode baru yaitu aspek Kebebasan, aspek Kesetaraan, dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

5

Penghitungan IDI menggunakan metode baru, yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, menyebabkan nilai IDI tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Potret demokrasi di NTB tetap dapat dilihat dari nilai IDI NTB. Tingkat demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni ‘rendah’ (indeks < 60), ‘sedang’ (indeks 60 – 80), dan ‘tinggi’ (indeks >80). Sejak tahun 2009 IDI NTB mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini sangat tergantung pada peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan demokrasi.

**Gambar 4.6**  
**Perkembangan Indeks Demokrasi NTB, 2009 – 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik

\*Tahun 2021 dan seterusnya menggunakan metode baru (tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya)

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2014, tingkat demokrasi di provinsi NTB dapat dikategorikan sedang. Hal ini tentunya lebih baik dari tahun 2009-2013, yang mana nilai IDI NTB masih berada dikategori rendah yaitu kurang dari 60. Selain itu, nilai IDI NTB tertinggi adalah pada tahun 2019 yaitu mencapai 76,64.

Penghitungan IDI dengan menggunakan metode baru, mulai dilakukan sejak tahun 2021. Hal ini menyebabkan nilai IDI tahun 2021 dan seterusnya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara kategori, indeks demokrasi di Provinsi NTB tahun 2022, masih dalam kategori sedang, yaitu mencapai 73,38.

Secara lebih mendalam, kinerja demokrasi dapat dilihat dari aspek penyusunnya, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Pada tahun 2022, aspek kesetaraan di Provinsi NTB termasuk dalam kategori sedang, dengan nilai 77,24. Kemudian aspek kebebasan termasuk dalam kategori sedang, dengan nilai 76,75. Sedangkan aspek kapasitas lembaga demokrasi masih dalam kategori sedang, dengan nilai 65,44.

Pada tahun 2021 nilai dari aspek kapasitas lembaga demokrasi berada pada kategori rendah yaitu dengan nilai <60 namun pada tahun 2022 sudah dalam kategori sedang. Hal ini dimungkinkan ada perbaikan pada kinerja lembaga demokrasi yaitu pada indikator ke 18 terkait putusan PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah dan indikator ke 20 yaitu Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah. Secara umum dibandingkan dengan tahun 2021, nilai Indeks Demokrasi Indonesia pada Provinsi NTB naik sebanyak 0,69 poin dari 72,69 menjadi 73,38. Kemudian khusus untuk indikator 17 yaitu

Netralitas Penyelenggara Pemilu, nilainya diupdate setiap 5 tahun sekali mengikuti dari saat setelah dilakukan Pemilu terakhir.

<https://htb.bps.go.id>



# LAMPIRAN TABEL

<https://id.scribd.com>



Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	1.053,87	10	122	742,07
Lombok Tengah	1.208,39	12	139	1.069,58
Lombok Timur	1.605,55	21	254	1.368,14
Sumbawa	6.643,98	24	165	522,36
D o m p u	2.321,55	8	81	243,40
B i m a	4.389,40	18	191	527,66
Sumbawa Barat	1.849,02	8	65	150,34
Lombok Utara	809,53	5	43	254,15
Kota Mataram	61,30	6	50	437,16
Kota Bima	222,25	5	41	159,11
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>20.164,84</b>	<b>117</b>	<b>1.151</b>	<b>5.473,97</b>

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020 - 2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	9	1	10
Partai Demokrat	7	0	7
Partai Gerindra	9	0	9
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	0	7
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7	0	7
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	0	1
PDI Perjuangan (PDIP)	4	0	4
Partai Amanat Nasional (PAN)	5	0	5
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	0	6
Partai Berkarya	2	0	2
Partai Nasdem	5	0	5
Partai Bulan Bintang (PBB)	2	0	2
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>65</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 3. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	0	2
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	0	4
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	1	5
PDI Perjuangan (PDIP)	2	1	3
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	5	0	5
Partai Gerindra	3	2	5
Partai Demokrat	4	0	4
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	3
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	0	5
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2	0	2
Partai Berkarya	5	0	5
Partai Perindo	1	0	1
PKPI	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>45</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	7	0	7
Partai Demokrat	5	1	6
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	1	6
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	1	6
PDI Perjuangan (PDIP)	1	0	1
Partai Gerindra	7	0	7
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	1	6
Partai Bulan Bintang (PBB)	4	0	4
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3	0	3
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2	0	2
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>48</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 5. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Demokrat	5	0	5
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	5	0	5
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3	0	3
Partai Amanat Nasional (PAN)	5	0	5
Partai Gerindra	5	0	5
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	0	5
PDI Perjuangan (PDIP)	1	3	4
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	0	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	0	5
Partai Bulan Bintang (PBB)	2	1	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3	1	4
Partai Berkarya	1	0	1
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>50</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 6. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PDI Perjuangan (PDIP)	4	2	6
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4	0	4
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3	0	3
Partai Berkarya	1	0	1
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	1	4
Partai Gerindra	5	0	5
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3	1	4
Partai Demokrat	4	1	5
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	0	4
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	1	4
Partai PKPI	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>45</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 7. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dompu Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	1	0	1
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	0	3
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	0	2
PDI Perjuangan (PDIP)	0	1	1
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	2
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4	0	4
Partai Gerindra	4	0	4
Partai Demokrat	3	0	3
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3	0	3
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2	0	2
Partai Berkarya	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>29</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 8. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bima Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	6	0	6
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	8	1	9
Partai Demokrat	4	0	4
Partai Gerindra	5	0	5
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3	0	3
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	0	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	1	5
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	0	2
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	1	2
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4	0	4
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>45</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 9. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	2	0	2
Partai Bulan Bintang (PBB)	2	0	2
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	0	2
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	0	2
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	0	3
PDI Perjuangan (PDIP)	4	1	5
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1	0	1
Partai Gerindra	1	1	2
Partai Demokrat	2	0	2
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	0	2
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	0	2
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>25</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 10. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Demokrat	4	0	4
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4	0	4
Partai Gerindra	5	0	5
PDI Perjuangan (PDIP)	3	0	3
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	1	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	0	2
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	0	2
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	0	2
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>30</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 11. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Mataram Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	6	3	9
Partai Gerindra	4	2	6
PDI Perjuangan (PDIP)	4	1	5
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
Partai Demokrat	2	2	4
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	1	5
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	0	1
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1	0	1
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	0	1
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	3
Partai Berkarya	1	0	1
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>40</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 12. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	3
Partai Gerindra	3	0	3
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2	1	3
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	0	2
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	1	2
Partai Demokrat	3	0	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	0	2
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2	0	2
Partai Bulan Bintang (PBB)	2	1	3
Partai Perindo	0	1	1
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>25</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 13. Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah DPT</b>
(1)	(2)
Lombok Barat	479.882
Lombok Tengah	760.482
Lombok Timur	906.094
Sumbawa	330.637
D o m p u	162.180
B i m a	365.795
Sumbawa Barat	89.442
Lombok Utara	171.541
Kota Mataram	293.192
Kota Bima	108.008
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>3.667.253</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 14. Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah DPTb</b>
(1)	(2)
Lombok Barat	825
Lombok Tengah	985
Lombok Timur	1.981
Sumbawa	2.947
D o m p u	475
B i m a	757
Sumbawa Barat	969
Lombok Utara	143
Kota Mataram	3.576
Kota Bima	798
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>13.456</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 15. Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah DPK</b>
(1)	(2)
Lombok Barat	19.631
Lombok Tengah	18.560
Lombok Timur	24.939
Sumbawa	7.744
D o m p u	7.516
B i m a	7.957
Sumbawa Barat	2.773
Lombok Utara	3.788
Kota Mataram	15.217
Kota Bima	3.222
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>111.347</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 16. Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih		Voters Turn out
		Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	479.882	414.825	65.057	86,44
Lombok Tengah	760.482	606.800	153.682	79,79
Lombok Timur	906.094	725.572	180.522	80,08
Sumbawa	330.637	280.692	49.945	84,89
D o m p u	162.180	144.966	17.214	89,39
B i m a	365.795	290.113	75.682	79,31
Sumbawa Barat	89.442	80.290	9.152	89,77
Lombok Utara	171.541	136.589	34.952	79,62
Kota Mataram	293.192	250.335	42.857	85,38
Kota Bima	108.008	92.294	15.714	85,45
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>3.667.253</b>	<b>3.034.763</b>	<b>632.490</b>	<b>82,75</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 17. Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

Kabupaten/Kota	Perolehan Suara			
	Jokowi-Amin		Prabowo-Sandi	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	106.322	26,52	294.638	73,48
Lombok Tengah	169.565	28,68	421.653	71,32
Lombok Timur	281.160	39,67	427.670	60,33
Sumbawa	105.358	38,16	170.746	61,84
D o m p u	37.767	26,60	104.192	73,40
B i m a	43.556	15,36	240.083	84,64
Sumbawa Barat	29.641	37,61	49.165	62,39
Lombok Utara	70.812	49,87	71.183	50,13
Kota Mataram	91.417	36,89	156.413	63,11
Kota Bima	15.644	17,15	75.576	82,85
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>951.242</b>	<b>32,11</b>	<b>2.011.319</b>	<b>67,89</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 18. Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di Nusa Tenggara Barat

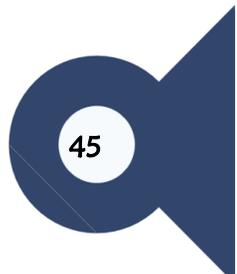
Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia saat Terpilih	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	Laki-laki	S-2	47	Bupati
Lombok Tengah	Laki-laki	S-1	52	Wakil Bupati
Lombok Timur	Laki-laki	S-2	61	Wiraswasta
Sumbawa	Laki-laki	S-1	65	Wakil Bupati
D o m p u	Laki-laki	SMA	45	Wiraswasta
B i m a	Perempuan	S-1	36	Wakil Ketua DPRD
Sumbawa Barat	Laki-laki	S-3	52	Sekretaris Daerah KSB
Lombok Utara	Laki-laki	S-1	71	Bupati
Kota Mataram	Laki-laki	S-2	48	Wakil Walikota
Kota Bima	Laki-laki	S-1	51	Anggota DPR RI
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>S-3</b>	<b>46</b>	<b>Anggota DPR RI</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 19. Jumlah Peraturan Daerah dan Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD di NTB Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	8	5
Lombok Tengah	10	0
Lombok Timur	6	0
Sumbawa	16	7
D o m p u	0	0
B i m a	3	0
Sumbawa Barat	18	7
Lombok Utara	7	0
Kota Mataram	5	4
Kota Bima	6	0
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022



Tabel 20. Jumlah Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang Mendaftar dan Total Terdaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi dan Kabupaten/Kota NTB Tahun 2022

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Ormas/LSM yang Mendaftar Tahun Ini</b>	<b>Total Ormas/LSM Terdaftar</b>
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	87	87
Lombok Tengah	27	252
Lombok Timur	37	137
Sumbawa	17	71
D o m p u	0	0
B i m a	47	164
Sumbawa Barat	10	73
Lombok Utara	0	35
Kota Mataram	5	53
Kota Bima	24	132
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>69</b>	<b>471</b>

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022

# D A T A

## MENCERDASKAN BANGSA

*Enlighten The Nation*

ISSN 2746-5128



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jalan Dr. Sudjono No.74 Mataram 83361  
Telp. (0370) 621385, Fax. (0370) 623801  
Homepage : <http://ntb.bps.go.id> Email: [ntb@bps.go.id](mailto:ntb@bps.go.id)